TAHUN
2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 562811; Fax : (0274) 564544
Surel : bpka@jogjaprov.go.id
Laman : bpka.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BPKA

WIYOS SANTOSO S.E, M.Acc.
NIP. 19680115 199403 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”:
   - Diukur dengan indikator Persentase Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
   - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 98,08% terjadi peningkatan sebesar 1,92%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Optimalisasi aset-aset Pemda DIY”:
   - Diukur dengan indikator nilai rupiah proyeksi Optimalisasi Aset-aset Pengelola Barang Milik Daerah.
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebanyak Rp 6.704.805.116,00 sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi Rp 5.239.098.025,00. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 78,14%.
   - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebanyak Rp 3.069.093.332,00 terjadi peningkatan sebanyak Rp 2.170.004.693,00.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 serta kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di segala bidang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan asli daerah melalui penyesuaian terhadap penilaian barang milik daerah berdasarkan kondisi perekonomian maupun penilaian dalam rangka pemanfaatan aset yang belum dilaksanakan penilaian.

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **i**

Ikhtisar Eksekutif ..... **ii**

Daftar Isi ..... **iii**

Daftar Tabel ..... **iv**

Daftar Gambar ..... **v**

BAB I Pendahuluan **1**

1.1 ***Cascading*** **Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah** 1

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi 3

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 6

1.4 Isu-Isu Strategis 7

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 7

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 11

BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja **12**

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 12

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 13

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021 13

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 17

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 19

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja **22**

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 22

3.2 Realisasi Anggaran 35

3.3 Inovasi 36

3.4 Lintas Sektor 50

BAB 4 Penutup **60**

L A M P I R A N **61**

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 8
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 9
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan 2021 9
Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2017-2022 13
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 13
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021 14
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021 16
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2021 17
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2021 18
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 22
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020 22
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 23
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1 25
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja 25
Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 26
Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 28
Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021 29
Tabel III.9 Program Kegiatan dalam KUA PPAS dan APBD TA 2022 29
Tabel III.10 Anggaran Kesesuaian dan ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemda DIY 30
Tabel III.11 Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2021 31
Tabel III.12 Kinerja Evaluasi APBD, Pembinaan Pengelola Keuangan dan Optimalisasi BUMD 32
Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 34
Tabel III.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 34
Tabel III.15 Nilai Realisasi Optimalisasi Aset Tahun 2021 35
Tabel III.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021 36
Tabel III.17 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 52

Daftar Gambar

Gambar I.1 *Cascading* Kinerja 2
Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 3
Gambar I.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan pada Organisasi BPKA DIY 6
Gambar II.1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring, dan Evaluasi, E-SAKIP 19
Gambar II.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah 20
Gambar II.3 Aplikasi Simpel 20
Gambar II.4 Aplikasi E-Persediaan 21
Gambar III.1 Penghargaan WTP 31

BAB 1

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 *Cascading Kinerja*

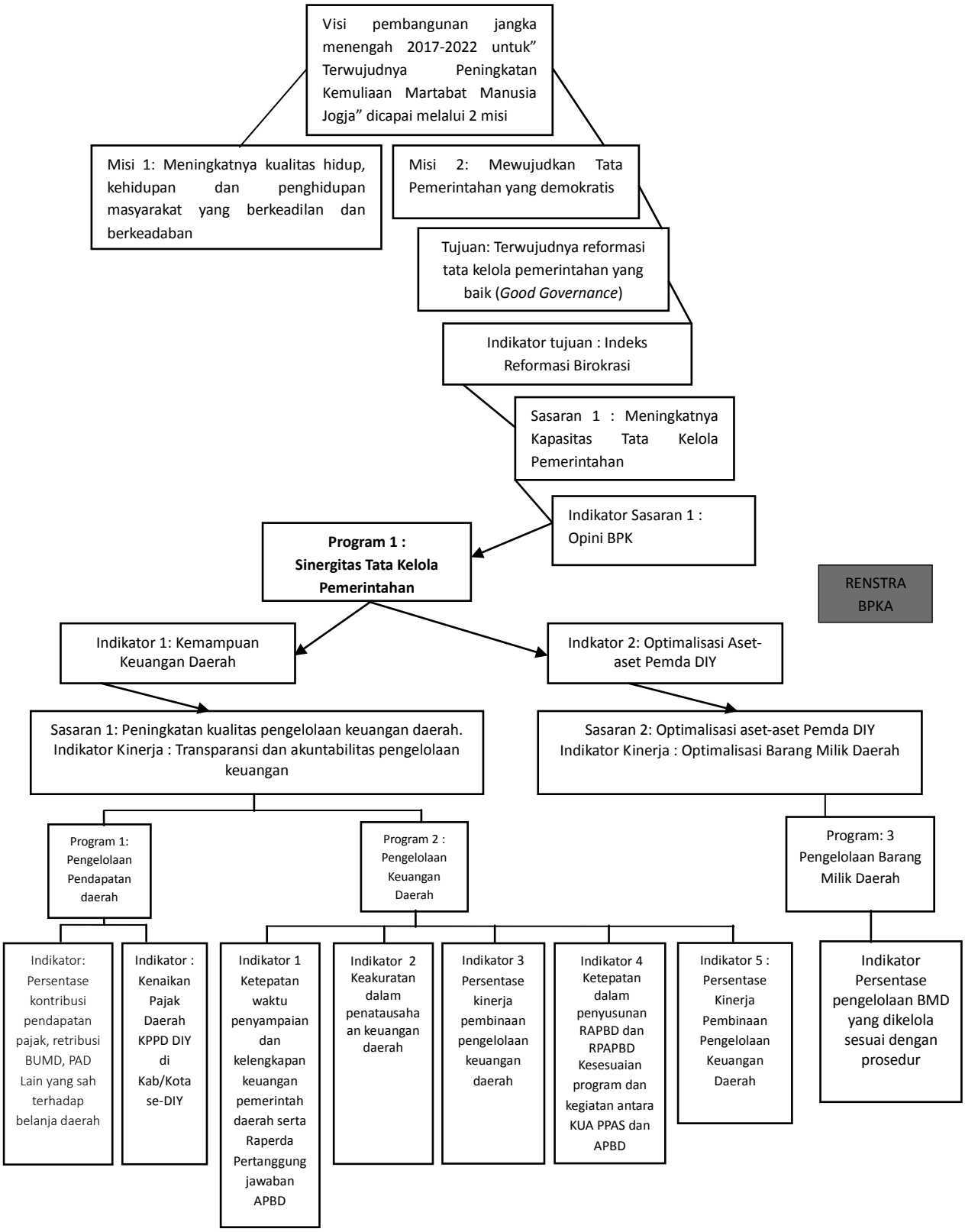

Sumber: Renstra BPKA DIY 2017-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

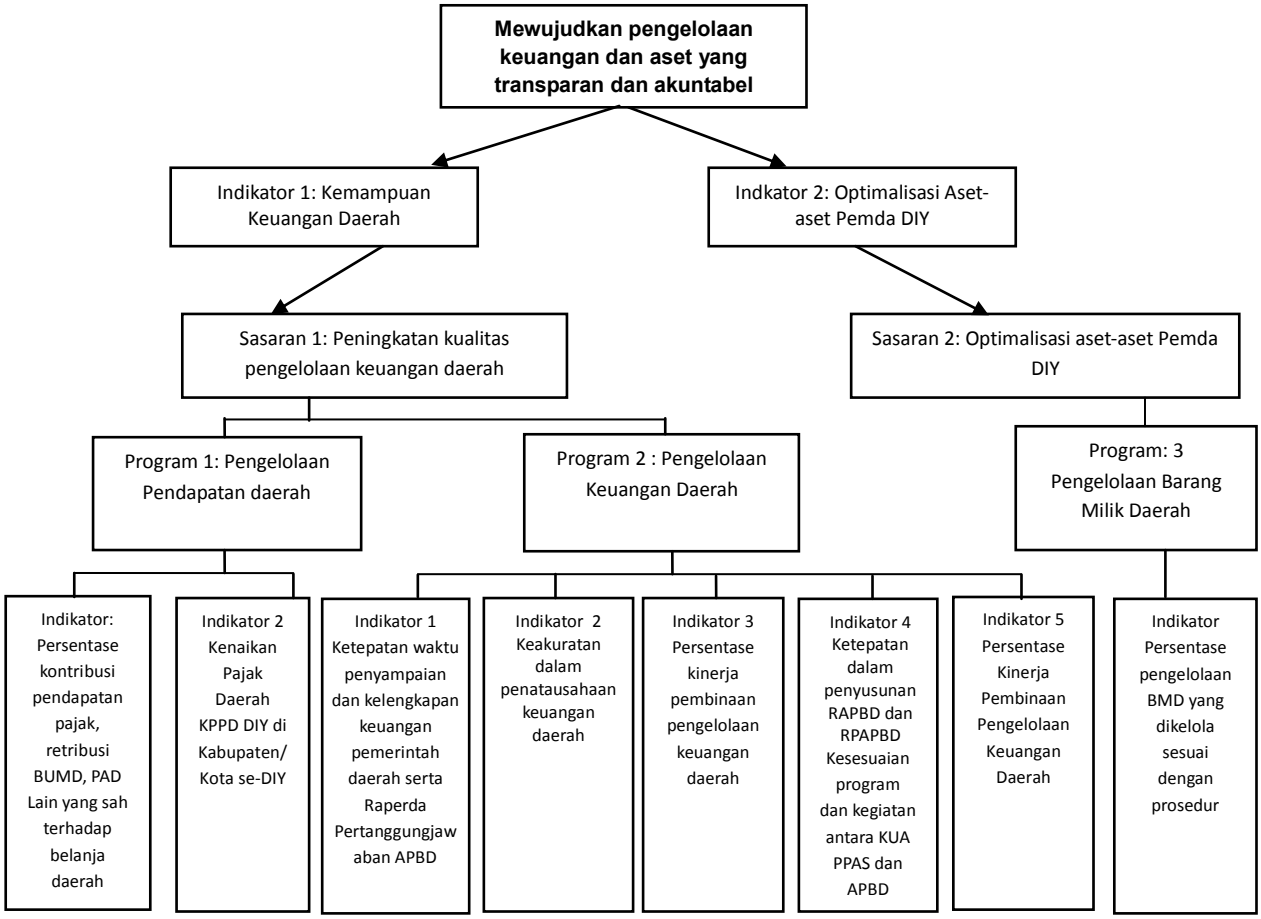

Sumber : Renstra BPKA DIY Tahun 2017-2022

Peta Proses Bisnis Pencapaian Sasaran Kinerja OPD

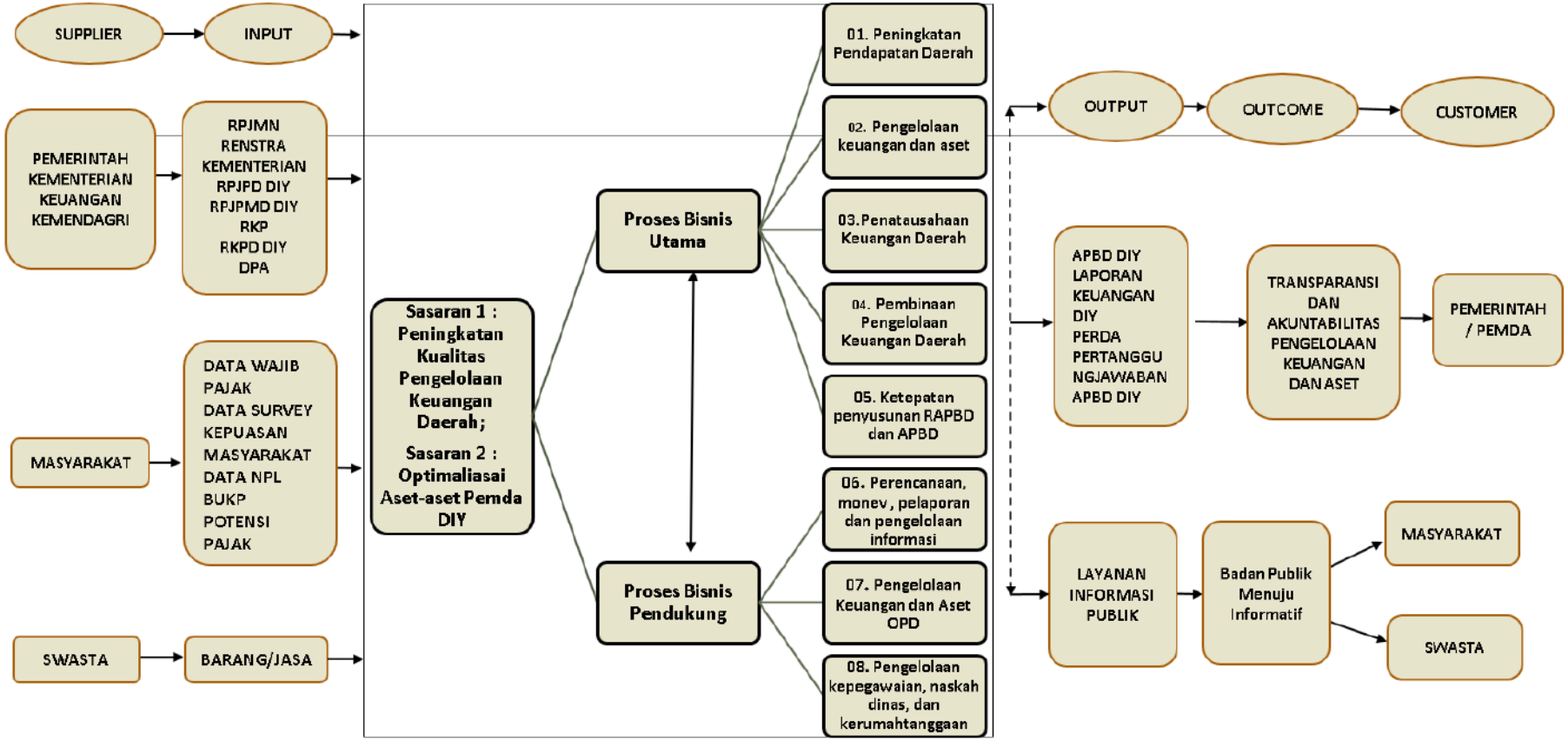

STRUKTUR ORGANISASI BPKA DIY

STRUKTUR ORGANISASI
(Pergub DIY No. 123 tahun 2021)

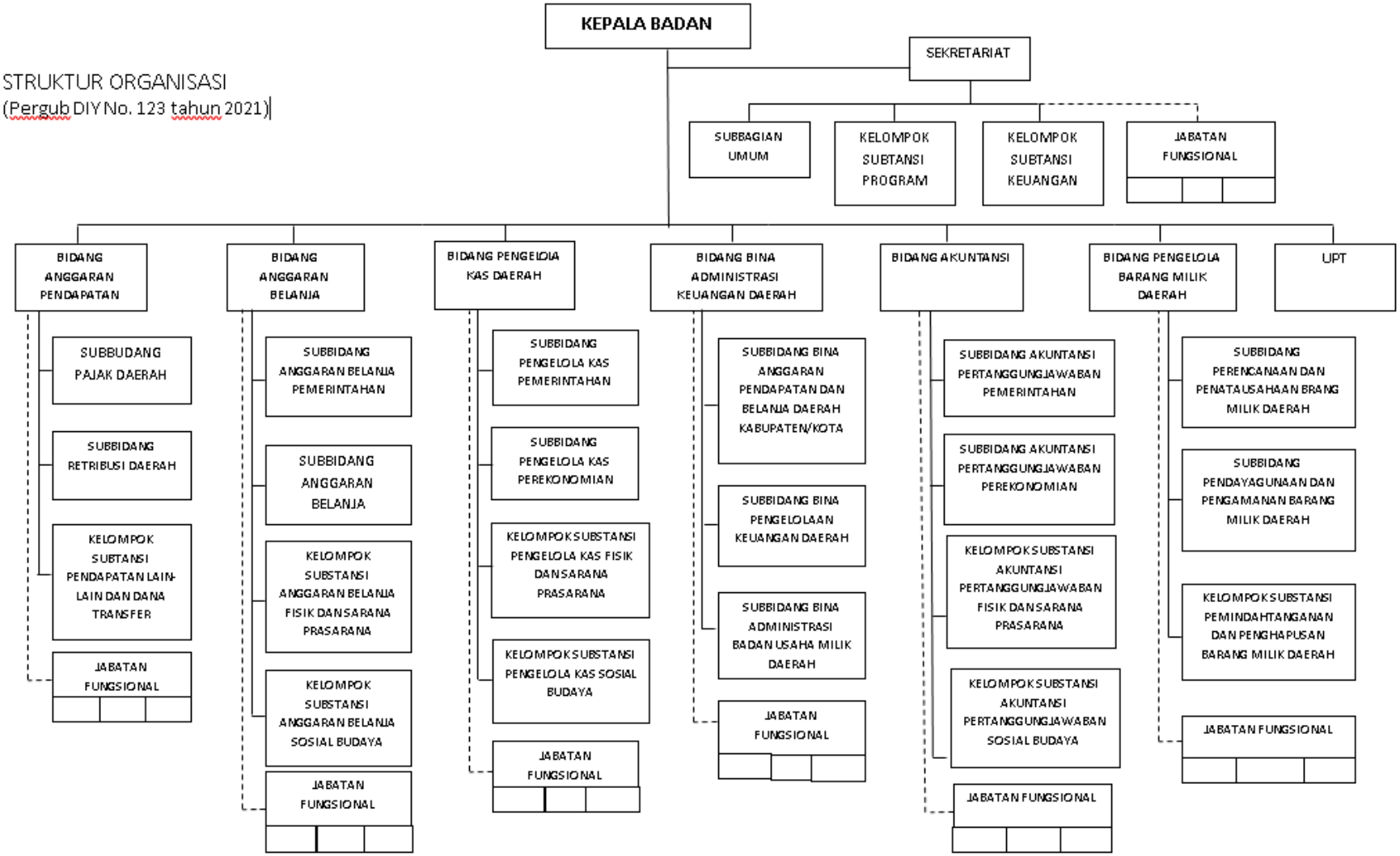

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BPKA DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Adapun fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kerja Badan ;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
h. pengelolaan barang milik daerah;
i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset, isu strategis yang melingkupi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel

   Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel adalah tuntutan dan harapan masyarakat, karena berkaitan erat dengan bagaimana pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari aspek perencanaan, penganggaran, penetapan dan pelaksanaan kinerja, monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja. Aspek-aspek di atas harus dapat dipertangungjawabkan dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan

   Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggungjawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien dalam pembelanjaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pengelolaan keuangan dan pembelanjaan anggaran harus dimanfaatkan untuk pembangunan yang dirasakan oleh lapisan masyarakat.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					L	P
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	12	12				11	6	5				6	5
	2. Pengawas	29		29			29	15	14				17	12
	3. Kelompok Substansi	10		10			7	3	4				3	4
	4. Pelaksana	375		188	181	6	178	18	68	42	45	5	102	76
C.	Jabatan Fungsional	12		12			0							
	Jumlah	439	13	239	181	6	226	43	91	42	45	5	129	97

Sumber: Data Kepegawaian BPKA, per 31 Desember 2021, data diolah

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 91 orang (40,26%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 43 orang (19,02%), SLTA: 45 orang (19,91%).D3: 42 orang (18,58 %) dan SLTP: 5 orang (2,21%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; demikian juga jabatan struktural laki-laki masih mendominasi.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 213 orang pada jabatan administrasi, terdiri dari 1 orang pejabat administrator, 3 pejabat kelompok substansi,197 pejabat pelaksana dan 12 orang jabatan fungsional. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	84 unit	11.229.186.442
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	11.462 unit	43.696.953.649
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	776 unit	5.495.021.964
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	2.478 buku	216.950.691
	Jumlah		60.638.112.746

Sumber: Data Neraca Aset BPKA, per Desember 2021, data diolah

**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1(satu) unit kendaraan dinas jabatan, 9 (sembilan) unit kendaraan dipinjampakai, 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan operasional, 2 (dua) unit kendaraan angkutan barang (pick up) dan 30 (tiga) unit kendaraan roda dua untuk operasional dan dipinjam pakai, Sepeda 3 (tiga) unit dan 6 (enam) unit Lain-lain angkutan (gerobak, Troli, box motor). Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan (Jumlah (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.777.052.098.785	1.770.409.354.831	(7.642.744.954)
4	1	01	Pajak Daerah	1.672.730.084.548	1.647.560.774.548	(25.129.310.000)
		02	Retribusi Daerah	893.454.475	805.090.775	(88.444.999)
		03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	86.558.389.843	93.923,341.444	7.364.951.601
		04	Lain-lain PAD yang Sah	16.870.169.919	28.120.148.064	11.249.978.145
4	2	01	PENDAPATAN TRANSFER	3.870.355.267.190	3.805.740.337.243	(64.614.929.947)
4	2	02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	3.869.575.248.000	3.804.935.291.933	(64.639.956.067)
			Pendapatan Transfer Antar Daerah	780.019.190	805.045.310	25.386.120
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000	7.576.500.000	0
4	3	1	Pendapatan Hibah	7.576.500.000	7.576.500.000	0
			Jumlah Pendapatan	5.654.983.865.975	5.583.726.192.074	71.257.673.901

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan (Jumlah (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	207.422.176.043	169.452.512.330	(37.969.663.713)
5	1	01	Belanja Pegawai	169.810.483.183	136.601.510.770	(33.208.972.413)
5	1	92	Belanja Barang Jasa	37.611.692.860	32.851.001.560	(4.760.691.300)
5	2		BELANJA MODAL	3.577.431.000	2.680.144.000	(897.287.000)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.604.406.000	Rp1.579.619.000	(24.787.000)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.043.600.000	143.600.000	(900.000.000)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap	929.425.000	956.925.000	27.500.000
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	69.073.641.335	90.251.899.580	21.178.258.245
			BELANJA TRANSFER	1.243.889.863.683	1.249.857.541.183	5.967.677.500
			Belanja Bagi Hasil	684.276.997.183	698.471.193.125	14.194.195.942
			Belanja Bantuan Keuangan	559.612.866.500	551.386.348.058	(8.226.518.442)
			Jumlah Belanja	1.523.963.112.061	1.512.242.097.093	(11.721.014.968)
			Total Surplus/(Defisit)	4.131.020.753.914	4.071.484.094.981	(59.536.658.933)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	486.302.765.821	489.453.213.139	3.150.447.318
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	481.302.765.821	484.453.213.139	3.150.447.318
6	1	02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	486.302.765.821	489.453.213.139	3.150.447.318
			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	122.500.000.000	117.500.000.000	5.000.000.000
			Penyertaan Modal Daerah	112.500.000.000	112.500.000.000	0
			Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	5.000.000.000	(5.000.000.000)
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	122.500.000.000	117.500.000.000	5.000.000.000
			Pembiayaan Neto	363.802.765.821	371.953.213.139	8.150.447.318

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKA Tahun 2021, data diolah

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset semula Rp 1.523.963.112.061,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.512.242.097.093,00 atau berkurang Rp 11.721.014.968,00 Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01402, tanggal 15 April 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. Rekomendasi:	
	Melakukan manajemen kinerja dengan baik dan terdokumentasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan serta monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah DIY	1. Manajemen kinerja menjadi bagian dari pembinaan pegawai. 2. Pembaruan daftar resiko berdasarkan potensi resiko dan LHP Inspektorat. 3. Review SKP pada beberapa jabatan agar inline dengan kinerja atasan. 4. Peningkatan kualitas pengukuran dan data capaian kinerja.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2021*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui review/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY selama lima tahun adalah:

"Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel"

Adapun sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	n/a	100	100	100	100	100	100
2	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset di Pengelola Barang Milik Daerah	Rp	n/a	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.967.568.518

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Perbaikan manajemen terhadap semua proses bisnis	1. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
			2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola keuangan dan pengelola pendapatan
			3. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan
			4. Meningkatkan sarpras yang mendukung peningkatan pendapatan
2.	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	1. Inventarisasi barang milik daerah untuk diperoleh aset idle 2. Mengevaluasi atas pelaksanaan roadmap pemanfaatan barang milik daerah	1. Meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme maupun produktifitas SDM pengelola barang di Pemda DIY
			1. Meningkatkan peran optimalisasi BMD sebagai kontributor peningkatan pendapatan
			2. Penyusunan SOP pengelolaan BMD 3. Monev dan pendampingan pengelolaan BMD pada OPD

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.1. **Program Pengelolaan Pendapatan**	**2.706.456.000**	**2.503.425.000**	**(203.031.000)**
	1.1.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.706.456.000	2.503.425.000	(203.031.000)
	1.1.1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.209.283.000	1.151.016.000	(58.267.000)
	1.1.1.2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	97.690.000	123.190.000	25.500.000
	1.1.1.3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah	1.020.783.000	944.319.000	(76.464.000)
	1.1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	378.700.000	284.900.000	(93.800.000)
	1.2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.318.381.339.950**	**1.345.334.212.445**	**26.952.872.495**
	1.2.1. **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**3.761.257.750**	**3.686.576.750**	**(74.681.000)**
	1.2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	313.163.000	332.045.000	18.882.000
	1.2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	305.935.000	341.185.000	35.250.000
	1.2.1.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	74.659.000	65.983.000	(8.676.000)
	1.2.1.4. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	641.754.000	669.837.000	28.083.000
	1.2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	914.355.000	874.905.000	(39.450.000)
	1.2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan PerDa tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peruabahan APBD	1.381.018.750	1.282.338.750	(98.680.000)
	1.2.1.7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	130.373.000	120.283.000	(10.090.000)
	1.2.2. **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota**	**404.442.000**	**366.792.000**	**(37.650.000)**
	1.2.2.1. Evaluasi Rancangan PerDa tentang APBD Kab / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	126.916.000	116.341.000	(10.575.000)
	1.2.2.2. Evaluasi Rancangan PerDa tentang Perubahan APBD Kab / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran PAPBD Kab/Kota	126.893.000	117.818.000	(9.075.000)
	1.2.2.3. Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	143.761.000	125.761.000	(18.000.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota			
	1.2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Konsolidasi Provinsi dan Kab/kota dan Statistik Keuangan Pemda	6.872.000	6.872.000	0
	1.2.3. **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**321.140.000**	**306.510.000**	**(14.630.000)**
	1.2.3.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	117.250.000	112.750.000	(4.500.000)
	1.2.3.2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dg Instansi terkait	203.890.000	193.760.000	(10.130.000)
	1.2.4. **Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**930.955.182**	**864.892.932**	**(66.102.250)**
	1.2.4.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semmesteran	114.620.000	114.620.000	0
	1.2.4.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	14.752.000	14.752.000	0
	1.2.4.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	557.944.000	527.965.250	(29.978.750)
	1.2.4.4. Penyusunan Tanggapan /Tindak Lanjut thd LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	6.411.000	6.411.000	0
	1.2.4.5. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PemDa	147.076.182	134.702.682	(13.373.500)
	1.2.4.6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	90.192.000	66.442.000	(23.750.000)
	1.2.4.7. **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.312.963.505.018**	**1.355.230.902.252**	42.267.397.234
	1.2.4.8. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	559.612.866.500	551.386.348.058	8.226.518.442)
	1.2.4.9. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	69.073.641.335	90.726.238.027	21.178.258.245
	1.2.4.10. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	684.276.997.183	713.118.316.167	28.841.318.984
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	**1.321.087.795.950**	**1.347.837.637.445**	**(133.462.679.550)**
2. **Optimalisasi Aset-aset**	1.3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.616.934.000.-**	**1.762.672.000,00**	**145.738.000,00**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pemda DIY	1.3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.616.934.000.-	1.762.672.000,00	145.738.000,00
	1.3.1.1. Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	285.114.000,00	335.114.000,00	50.000.000,00
	1.3.1.2. Penilaian Barang Milik Daerah	800.000.000,00	827.500.000,00	27.500.000,00
	1.3.1.3. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	476.428.000,00	476.428.000,00	0,00
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	**1.616.934.000,00**	**1.762.672.000,00**	**145.738.000,00**
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**1.322.704.729.950,00**	**1.349.600.345.445,00**	**26.895.615.495,00**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPKA DIY Tahun 2021

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**164.652.547.387**	**131.138.881.252**	**(33.513.666.135)**
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**118.173.000**	**102.843.000**	**(15.330.000)**
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.406.000	40.076.000	(6.330.000)
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.758.000	18.358.000	(2.400.000)
	1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.747.000	19.947.000	(1.800.000)
	1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.262.000	24.462.000	(4.800.000)
	2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**157.039.010.559**	**136.449.140.770**	**(20.589.869.789)**
	1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	156.853.760.559	136.280.690.770	(20.573.069.789)
	1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.880.000	91.080.000	(16.800.000)
	1.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.490.000	53.490.000	0
	1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.477.000	14.477.000	0
	1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.780.000	6.780.000	0
	1.6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.623.000	2.623.000	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**4.407.462.500**	**3.089.242.500**	**(1.318.220.000)**
	3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.292.462.500	2.974.242.500	(1.318.220.000)
	3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	115.000.000	115.000.000	0
	4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**714.409.000**	**714.409.000**	**0**
	4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.302.000	15.302.000	0
	4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.660.000	3.660.000	0
	4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.560.000	69.560.000	0
	4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	279.298.000	279.298.000	0
	4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	9.276.000	9.276.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Perundang-undangan			
	4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.423.000	276.423.000	0
	4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.930.000	20.930.000	0
	5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	254.927.000	254.927.000	0
	5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.927.000	254.927.000	0
	6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	1.579.640.800	1.537.840.000	(41.800.000)
	6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	283.806.000	283.406.000	0
	6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	864.937.000	823.137.800	(41.800.000)
	6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.260.000	67.260.000	0
	6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.637.000	363.637.000	0
	7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**470.248.528**	**435.355.528**	**(34.893.000)**
	7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.590.000	9.590.000	0
	7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.465.500	202.572.500	(34.893.000)
	7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.240.000	143.240.000	0
	7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.953.028	79.953.028	0
	Total Anggaran Pendukung	**164.652.547.387**	**154.420.179.648**	**(10.232.367.739)**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPKA DIY Tahun 2021

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	21
					Triwulan II	48
					Triwulan III	75
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset pengelola barang milik daerah	Rupiah	6.704.805.116	Triwulan I	2.245.441.800
					Triwulan II	2.427.733.600
					Triwulan III	3.419.000.000
					Triwulan IV	6.704.805.116

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 11.250.038.000,00
2	Program Peningkatan Pendapatan KPPD		
3	Program pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp1.318.412.765.950,00
4	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah		
5	Program Penatausahaan Keuangan Daerah		
6	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.716.934.000,00
8	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah		
9	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp192.583.374.111,00
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		

Pada tahun 2021, Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset melakukan review Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Review dilakukan karena adanya rasionalisasi kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daderah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	21
					Triwulan II	48
					Triwulan III	75
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset pengelola barang milik daerah	Rupiah	6.704.805.116	Triwulan I	2.245.441.800
					Triwulan II	2.427.733.600
					Triwulan III	3.419.000.000
					Triwulan IV	6.704.805.116

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran perubahan sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 10.725.033.000,00
2	Program Peningkatan Pendapatan KPPD		
3	Program pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.345.334.212.445,00
4	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah		
5	Program Penatausahaan Keuangan Daerah		
6	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.762.672.000,00
8	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah		
9	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 154.420.179.648,00
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *sengguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

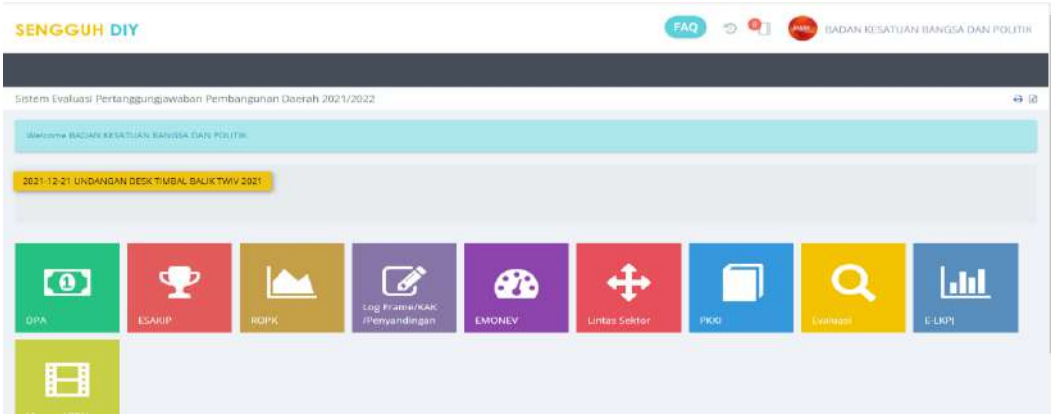

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

2. Instrumen pendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengintegrasikan sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

Gambar II.2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sumber : http:// sipd.jogjaprov.go.id

3. Instrumen selanjutnya berupa sistem/aplikasi pendamping SIPD dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD yang integratif dan *online,* digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Gambar II.3 Aplikasi Simpel

Sumber : http://simpel.jogjaprov.go.id

4. Sistem Informasi Aplikasi Persediaan

Aplikasi Persediaan berbasis Web adalah Aplikasi Persediaan yang lebih memadai sehingga menghasilkan Laporan Persediaan yang akurat dan akuntabel. Aplikasi ini dibutuhkan dalam rangka membantu pencatatan persediaan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada akun Persediaan dan Beban Persediaan. Namun yang utama dari Aplikasi Persediaan adalah sebagai kontrol penggunaan barang persediaan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Aplikasi Persediaan dapat diketahui jumlah dan nominal barang persediaan secara *real-time* sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang Persediaan.

Gambar II.4 Aplikasi E-Persediaan

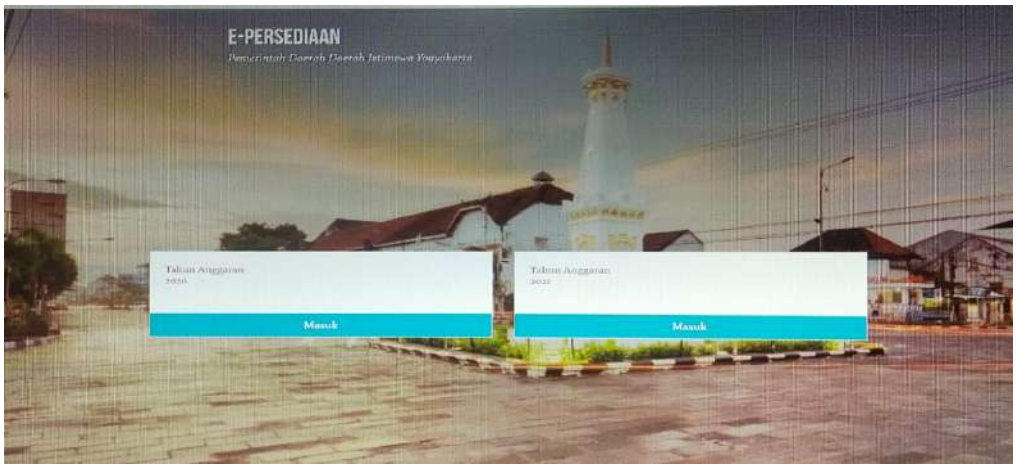

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2021*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	indikator/Meta Indikator	Satuan	Baseline 2017	Capaian 2020	Tahun 2021				Target Akhir Rpjmd
						Target	Realisasi	Persen-tase	Kriteria / Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indikator: Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Meta Indikator: Meningkatnya PAD (20%) APBD yang tepat dan akurat (20%) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%)	%	100	98,07%	100	100	100	Sangat Baik	100
2	Optimalisasi Aset Aset Pemda DIY	Indikator: Optimalisasi aset aset pengelola barang milik daerah Meta Indikator: Nilai proyeksi aset pengelola	rupiah	n/a	3.069.093.332	6.704.805.116	5.239.098.025	78,14	Tinggi	6.967.568.518

Analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolan keuangan daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Secara kualitatif capaian kinerja sebesar 100% dengan formulasi penghitungan sebagai berikut : 1. Meningkatnya PAD (bobot kualitatif sebesar 20%) 2. APBD yang tepat dan akurat (bobot kualitatif sebesar 20%) 3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot kualitatif sebesar 20%) 4. Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (bobot kualitatif sebesar 20%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot kualitatif sebesar 20%).

Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang merupakan penghitungan secara kualitatif terhadap 5 (lima) meta indikator yang dirumuskan sebagai berikut:

$$TA = \sum PAD + \sum APBD + \sum LKD + \sum KAD + \sum PKD$$

Keterangan:

TA = Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
∑PAD = sub meta indikator meningkatnya PAD
∑APBD = sub meta indikator APBD yang tepat dan akurat
∑LKD = sub meta indikator laporan keuangan akuntabel
∑ KAD = sub meta indikator penetausahaan keuangan yang akurat
∑PKD = sub meta indikator pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten

Penghitungan masing-masing sub indikator adalah sebagai berikut:

1. Sub meta indikator meningkatnya PAD, digunakan untuk mengetahui besaran kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan realisasi pendapataan asli daerah (PAD) tahun berjalan (n) dengan realisasi pendapatan PAD tahun sebelumnya (n-1), diformulasikan sebagai berikut :

$$\sum PAD = PAD(n)/PAD(n-1)$$

Keterangan:

∑PAD = meningkatnya PAD

PAD(n) = realisasi PAD tahun 2021

PAD(n-1) = realisasi PAD tahun 2020

2. Sub meta indikator APBD yang tepat dan akurat digunakan untuk mengetahui ketepatan penyusunan APBD baik murni maupun perubahan sesuai dengan tatakala waktu dan akurasinya dilihat dari konsistensi antara program kegiatan/sub kegiatan antara dokumen perencanaan dan RAPBD, diformulasikan:

$$\sum APBD = (AB + BD)/2$$

Keterangan:

∑APBD = APBD yang tepat dan akurat

AB = APBD tepat waktu = 100%

BD = APBD akurat= 85%(P2/P1) + 15%(K2/K1)x100%

P2 = program sesuai RAPBD

P1 = program sesuai KUA PPAS

K2 = kegiatan sesuai RAPBD

K1 = kegiatan sesuai KUA PPAS

3. Sub meta indikator laporan keuangan akuntabel diukur dengan mencermati kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 agar dapat diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Formulasi meta indikator laporan keuangan sebagai berikut:

$$\sum LKD = (LK1\ (sesuai) + KD2\ (tepat\ waktu)$$

Keterangan:

∑LKD = laporan keuangan akuntabel

LK1 = laporan keuangan sesuai standar SAP = 60%

KD2 = laporan keuangan dan pertanggungjawaban tepat waktu=40%

4. Sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat adalah untuk mengetahui tingkat akurasi antar dokumen penatausahaan yang diterbitkan dengan memperbandingkan antar dokumen SP2D dan SPM yang diterima, formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\sum KAD = \sum SP2D / \sum SPM \times 100\%$$

Keterangan:

∑KAD = penatausahaan keuangan yang akurat

∑SP2D = dokumen SP2D yang diterbitkan

∑SPM = dokumen SPM yang diterima

5. Sub meta indikator kinerja pembinaan pengelolaaan keuangan daerah yang konsisten, diukur melalui hasil evaluasi APBD kabupaten/kota, regulasi keuangan daerah yang sesuai sisdur, serta optimallisasi kinerja BUMD, diformulasikan sebagai berikut:

$$\sum PKD = \sum EAP + \sum EAK + + \sum EAD$$

Keterangan:

$\sum PKD$ = pembinaan pengelokaan keuangan daerah konsisten
$\sum EAP$ = evaluasi APBD Kabupaten/Kota
$\sum EAK$ = regulasi keuangan daerah sesuai sisdur
$\sum EAD$ = realisasi deviden BUMD

Hasil penghitungan kualitatif dari 5 (lima) sub meta indikator tersebut di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1

Sub meta Indikator	Hasil Sub meta-indikator	Capaian sub meta indikator	Bobot
Sub meta indikator meningkatnya PAD (∑PAD) (bobot kualitatif sebesar 20%)	1.820.015.015.982.350,01	101,07%	20%
APBD yang tepat dan akurat (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (bobot kualitatif sebesar 20%)	100%	100%	20%
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot kualitatif sebesar 20%).	100%	100%	20%
		Jumlah (TA)	**100%**

Kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	98,07%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Ketercapaian Sasaran Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tercapai 100%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100%

b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 98,07%, terdapat kenaikan sebesar 1,93 %.

c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah didukung dari :

a. Capaian peningkatan pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah BPKA DIY pada APBD tahun 2020 sebesar Rp 1.800.739.024.337,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.820.015.982.350,01. Artinya pada APBD tahun 2021 terdapat kenaikan PAD sebesar Rp 19.276.958.013,00 atau 1,07%. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel III.6 APBD DIY Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Kode	Uraian	Tahun	
		20201 (tahun n-1)	2021 (tahun n)
1	2	3	4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.800.739.024.337,00	1.820.015.982.350,01
4.1.1	Pajak Daerah	1.646.559.198.863,00	1.688.443.843.923,00
4.1.2	Retribusi Daerah	736.782.032,00	1.020.834.115,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	101.460.382.151,46	96.338.516.913,54
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	51.982.661.290,54	34.212.787.398,47
	Jumlah	**1.800.739.024.337,00**	**1.820.015.982.350,01**

Sumber: APBD DIY TA.2020 dan 2021, data diolah.

Perhitungan data tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

$\sum PAD$ = PAD (n)/PAD(n-1)

= 1.820.015.982.350.01/1.800.739.024.337,54

= 101,07

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh hasil 101,07, artinya melebihi target sehingga sub meta indikator meningkatnya PAD dengan bobot 20% terpenuhi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja meningkatnya PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Intensifikasi pendapatan dilakukan dengan cara validasi data dan pemuthakiran data untuk dapat menghitung potensi seakurat mungkin, sehingga target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara menggali potensi potensi pendapatan baru yang

mungkin muncul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selama pandemi aktifitas masyarakat menjadi terbatas. Hal ini disikapi dengan adanya perbaikan layanan yang dilakukan termasuk melakukan inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga dilakukan modernisasi administrasi sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menambah metode dan kanal-kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah karena dirasa mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya di tengah keterbatasan aktivitas selama pandemi. Penyediaan kanal-kanal pembayaran digital baru juga sejalan dengan semangat Pemerintah Pusat untuk mendorong Adanya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dari sisi pengelolaan pajak dan retribusi, Pemda DIY bekerjasama dengan PT Bank BPD DIY dengan dibukanya kanal pembayaran melalui *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* BPD DIY untuk layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga dibuka layanan pembayaran pajak daerah melalui e-commerce *GOJE*K dengan menu *GOBILLS*.

Selain itu dalam rangka mencapai target kinerja sasaran tahun 2021, intensifikasi pajak daerah dilakukan dengan cara pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door*, mengirimkan surat kepada wajib pajak melalui kegiatan Super PKB, melakukan sosialisasi kepada kelurahan di wilayah Samsat untuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan di wilayah Samsat. Pelayanan secara *Drive Thrue* juga telah diberikan untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak secara cepat tanpa turun dari kendaraan. Selain itu dengan adanya fasilitas *E-Posti* dimana wajib pajak melakukan pembayaran pajak cukup melalui mesin ATM. Perluasan jangkauan layanan dengan mendirikan SAMSAT Desa dirasakan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di sekitar SAMSAT Desa.

Peningkatan pendapatan retribusi melalui Intensifikasi dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki potensi pendapatan, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Retribusi. Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi dari aset yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah untuk menggali potensi pendapatan yang menjadi wewenangnya. Realisasi PAD Tahun 2021 berhasil melampui target yang dianggarkan, yaitu sebesar Rp39.335.065.525,23 atau 2,11% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan upaya pemungutan sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD sampai saat ini masih berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 88,82% dari total penerimaan PAD Tahun 2021.

Perbandingan antara realisasi pendapatan tahun 2020 dan 2021 sebagaiman tersaji pada tabel berikut :

Tabel III.7 Realisasi APBD BPKA DIY Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Kode	Uraian	Tahun		Bertambah/ berkurang	%
		2020 (Rp.)	2021 (Rp.)		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.800.739.024.337,00	1.820.015.982.350,01	19.276.958.013,00	0,01
4.1.1	Pajak Daerah	1.646.559.198.863,00	1.688.443.843.923,00	41.884.645.060,00	0,02
4.1.2	Retribusi Daerah	736.782.032,00	1.020.834.115,00	284.052.083,00	0,38
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	101.460.382.151,46	96.338.516.913,54	(5.121.865.238)	(0,05)
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	51.982.661.290,54	34.212.787.398,47	(17.769.873.892)	(0,34)

Sumber: BPKA DIY, 2021 data diolah

Dampak ekonomi akibat pandemi mempengaruhi kemampuan masyarakat wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, untuk itu Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban masyarakat wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan pajak, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang disahkan pada tanggal 30 Juni 2021 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Respon positif dari masyarakat luas yang memanfaatkan adanya kebijakan tersebut dapat terlihat dari animo masyarakat yang melakukan pembayaran pajak sebelum berakhirnya kebijakan, oleh karena itu kebijakan bebas denda ini juga dapat dinilai berhasil dan menjadi salah satu faktor tercapainya target penerimaan pajak daerah di tahun 2021.

b. Capaian APBD yang tepat dan akurat

Perda Perubahan APBD TA 2021 telah ditetapkan sesuai tata kala waktu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yaitu paling lambat 3 (tiga bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berkhir, sedang Perda APBD 2022 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, program, kegiatan maupun sub kegiatan konsisten dengan dokumen KUA dan PPAS 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.8 Penetapan APBD

Uraian	Tanggal	Keterangan
1	2	3
PAPBD 2021	12 Oktober 2021	Tepat = 100%
APBD TA.2022	31 Desember 2021	

Sumber:BPKA DIY tahun 2021, data diolah

Tabel III.9 Program kegiatan dalam KUA PPAS dan APBDTA.2022

Uraian	Jumlah		Keterangan
	Program	Kegiatan	
1	2	3	4
KUA PPAS	132	275	Akurat = 100%
RAPBD	132	275	

Sumber:BPKA DIY tahun 2021, data diolah

Akumulasi penghitungan data dari kedua tabel di atas,hasilnya sebagai berikut:

$$\sum APBD = (AB + BD)/2$$
$$= 100\% + ((85\%(132/132x100)+15\%(275/275)x100)))/2$$
$$= 100\%$$

Dari hasil penghitungan di atas, sub meta indikator APBD tepat waktu dan akurat tercapai 100% sehingga bobot 20% terpenuhi.

Upaya yang dilakukan agar penyusunan APBD dan Perubahan APBD tepat waktu dan akurat adalah selalu mengikuti tahapan tata kala waktu sesuai pedoman peraturan yang berlaku dalam penyusunan APBD.

c. Capaian laporan keuangan daerah yang akuntabel

Diukur dengan melihat kelengkapan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendagri 77 tahun 2020 agar dapat dilakukan diaudit untuk memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Tabel III.10 Kesesuaian dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemda DIY

No	Uraian	Penyajian Laporan		Penyusunan Laporan		Ket.
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	
1	2	3	4	5	6	7
1	Unsur SAP (PP Nomor 71 tahun 2010)					
	1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	v	-			Sesuai
	2) Neraca	v	-			
	3) Laporan Operasional (LO)	v	-			
	4) Laporan perubahan ekuitas (LPE)	v	-			
	5) Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	v	-			
	6) Laporan Arus Kas (LAK)	v	-			
					Nilai (LK1)	**60%**
2	Penyusunan Laporan Keuangan (Permendagri 77/2020)					
	1) Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020			Maret 2021	-	**Tepat**
					Nilai (LK2)	**40%**

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2021, data diolah

Penghitungan sesuai data di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

∑LKD = (LK1 (sesuai)+ KD2 (tepat waktu)
= 60% + 40%
= 100%

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, sub meta indikator laporan keuangan yang akuntabel tercapai 100%, bobot 20% terpenuhi.

Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD disusun oleh Pemerintah Daerah paling lambat minggu keempat Februari tahun selanjutnya.

Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2020 *un audited* selesai disusun pada tanggal 15 Februari 2021 Setelah dilakukan *review* oleh Inspektorat DIY kemudian disampaikan kepada BPK RI pada tanggal 26 Februari 2021. Pada tahun 2021 Pemda DIY memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK yang ke 11 (sebelas) kali berturut-turut terhadap laporan keuangan Pemda DIY. Atas prestasi tersebut diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar III.1 Penghargaan WTP

Yogyakarta (26/10/2021) jogjaprov.go.id – Untuk ke-11 kalinya, secara berturut-turut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI.

Piagam penghargaan telah diterima oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (26/10) siang di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, didampingi Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan Kepala BPKA DIY Wiyos Santosa. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Arif Wibawa, MM.

Sumber : Humas Pemda DIY tahun 2021

d. Capaian penatausahaan keuangan yang akurat

Capaian kinerja penatausahaan yang akurat dihitung dengan cara membandingkan jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dengan jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sebagai berikut :

Tabel III.11 Realisasi SP2D dan SPM Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1.	SP2D		
	Belanja Operasi	2.972 dokumen	-
	Belanja Operasi non Gaji	9.296 dokumen	-
2.	SPM		
	Belanja Operasi	2.972 dokumen	-
	Belanja Operasi non Gaji	9.296 dokumen	-

Sumber: BPKA DIY, tahun 2021, data diolah

Penghitungan atas data **di atas**, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\sum KAD = \sum SP2D / \sum SPM \times 100\%$$
$$= (2.972 + 9.296)/(2972+9296) \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Dari hasil perhitungan di atas adalah 100%, artinya sub meta indikator penatausahaan keuangan yang akurat dengan bobot 20% tercapai.

Upaya yang dilakukan agar penatausahaan keuangan selalu akurat antara lain pencairan dan dilakukan dengan teliti dan cermat, komunikasi dengan OPD pengelola terus dibangun, sistem pendukung memadai, melaksanakan aturan pemerintah dalam teknis pelaksanaan penatausahaan khususnya transaksi non tunai.

e. Capaian kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah

Capain kinerja diukur melalui hasil evaluasi APBD Kab/Kota, regulasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan dan prosedur, serta mengoptimalkan kinerja BUMD. Data evaluasi APBD Kab/Kota, penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel III.12 Kinerja Evaluasi APBD, Pembinaan Pengelola Keuangan dan Optimalisasi BUMD
Sumber: BPKA DIY, Tahun 2021, data diolah

No.	Uraian	Target	Realisasi	%	Bobot
1	**Evaluasi APBD Kab / Kota (∑EAP)**				**34,00%**
1.1	APBD TA. 2022	5 dokumen	5 dokumen	100%	34,00%
1.2	PAPBD TA. 2021	5 dokumen	5 dokumen	100%	
1.3	Pertanggungjawaban APBD TA 2020	5 dokumen	5 dokumen	100%	
2	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan (∑EAK)**				**33,00%**
2.1	Regulasi rutin	20 dokumen	20 dokumen terdiri : -15 dokumen Penetapan KPA Dana Dekonsentrasi - 1 dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - 2 dokumen penetapan Bendahara dan KPA BOS - 2 dokumen penetapan bendahara KPA/KPB	100%	33,00%
3	**Penguatan kelembagaan, Penurunan NPL, Penyaluran Dana Pemerintah (∑EAD)**				**33,00%**
3.1	Penurunan NPL	20,66 %	19,45%	106,22%	
3.2	**Deviden**			100%	
3.2.1	Deviden BUMD	89.948.853.516,22	89.948.853.516,22	100%	
3.2.2	Deviden BUKP	6.385.055.910,53	6.385.055.910,53	100%	
3.3	**Penyaluran Dana Pemerintah**			72,02%	
3.3.1	PT Bank BPD DIY	510.707.000.000	112.500.000.000	22,02%	
3.3.2	BUKP	10.000.000.000	5.000.000.000	50,00%	

Dari data di atas, perhitungan akumulasi realisasi evaluasi APBD Kabupaten/Kota (∑EAP) sebesar 34,00%, Pembinaan pengelolaan keuangan dan penguatan kelembagaan(∑EAK) sebesar 33,00% dan penurunan NPL dan penyaluran dana pemerintah (∑EAD) sebesar 33,00%,

perhitungan sub meta indikator persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah konsisten, adalah sebagai berikut:

$$\sum PKD = \sum EAP + \sum EAK + + \sum EAD$$
$$= 34{,}00\% + 33{,}00\% + 33{,}00$$
$$= 100\%$$

Sesuai perhitungan di atas, diperoleh hasil 100%, maka bobot 20% tercapai

Agar kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah selalu konsisten upaya yang dilakukan yaitu berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dalam melakukan evaluasi APBD Kabupaten/Kota dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota, responsif dalam menindaklanjuti amanah perundang-undangan, komunikasi dan koordinasi terus dibangun dengan mitra kerja baik OPD, Pemda Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Milik Daerah serta pembinaan yang intensif dan efektif atas BUMD dan BUKP.

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.
b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
c. Dukungan anggaran melalui APBD, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.
d. Dukungan Sarana prasarana dan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah melalui bimbingan teknis, diklat dan sarana pengembangan kompetensi lainnya
f. Pemaanfaatan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.1.2. Sasaran 2: Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY

Tolok ukur capaian sasaran optimalisasi aset-aset Pemda DIY diukur dengan dengan indikator Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Indikator: Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	Meta indikator: Nilai proyeksi aset pengelola

Sumber data diolah dari perhitungan nilai rupiah realisasi atas proyeksi aset-aset pengelola, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$OAP = \sum ORD + \sum OTP + + \sum ODS$$

Keterangan:

OAP = optimalisasi aset

ORD = retribusi rumah dinas, tanah dan bangunan

OTP = sewa lahan dan bangunan

ODS = kontribusi pihak ketiga

Kinerja sasaran optimalisasi aset-aset Pemda dengan indikator optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	3.069.093.332	6.704.805.116	5.239.098.025	78,14	6.967.568.518	75,19

Analisis Ketercapaian Sasaran: Optimalisasi aset-aset Pemda adalah sebagai berikut:

a. Tercapai Rp 5.239.098.025,00 dari proyeksi Rp 6.453.519.026,00 dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 78,14%, sehingga target tahun 2021 tidak tercapai.

b. Dibandingkan realisasi tahun lalu (2020) sebesar Rp3.069.093.332,00 terdapat peningkatan sebesar Rp 2.170.004.693,00.

c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Data realisasi atas proyeksi optimalisasi aset pada pengelola barang milik daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.15 Nilai Realisasi Optimalisasi Aset Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi
1	2	3
1	Retribusi Rumah dinas	Rp 134.600.660,00
2	Retribusi tanah dan bangunan	Rp 333.917.365,00
3	Sewa lahan parkir Mall Malioboro	Rp 1.000.000.000,00
4	Sewa tanah dan bangunan	Rp 2.937.180.000,00
5	Kontribusi PT Yogya Indah Sejahtera (PT. YIS)	Rp 833.400.000,00

Hasil penghitungan nilai optimalisasi aset-aset pengelola BMD sebagai berikut:

OAP = ∑ORD+∑OTP+∑ODS

= (134.600.660 + 333.917.365) + (1.000.000.000+2.937.180.000) + 833.400.000

= 5.239.098.025

Realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik daerah tidak mencapai target dikarenakan faktor eksternal, yang menyebabkan pelaku usaha yang sudah terikat sewa kontrak mengajukan keringanan pembayaran sewa tanah atau bangunan, hingga mengakhiri kontrak karena pembatasan aktivitas ekspo/event berskala besar.

Faktor Penghambat keberhasilan

a. Nilai appraisal dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah tidak dapat dimaksimalkan sebagai akibat penurunan perekonomian masyarakat;
b. Pendayagunaan barang milik daerah dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan asli daerah belum optimal;
c. Adanya pengajuan penurunan tarif sewa terhadap barang milik daerah oleh mitra pemanfaat.

3.2. Realisasi Anggaran

Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100 %	100%	1.364.752.735.184	1.317.035.001.603	96,51	3,49%
2	Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah	Optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah	6.704.805.116	5.239.098.025	78,14	1.762.672.000	1.598.354.420	90,68	-
Jumlah						1.366.515.407.184	1.318.633.356.023	96,50	
Program pendukung						154.420.179.648	144.811.786.466	93,78	
Total Belanja Langsung						1.520.935.586.832	1.463.445.142.489	96,22	

Sumber: *Laporan Keuangan BPKA Th 2021, data diolah*

Berdasarkan tabel III.5 di atas capaian kinerja sasaran Badan pengelola Keuangan dan Aset tidak mencapai target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp1.366.515.407.184 terealisasi Rp1.318.633.356.023 atau 96,50% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp47.882.051.161,00 atau 3,49% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi makanan dan minuman harian umum

3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara

langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

a. Pemanfaatan media sosial dan Google (misalnya layanan unduhan via Google Drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
b. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi BPKA DIY misalnya aplikasi E-Persediaan, Simpel.
c. Pemanfaatan kanal-kanal pembayaran secara online.

Adapun inovasi yang dilakukan oleh BPKA DIY diantaranya sebagai berkut :

Pemanfaatan media sosial (Instagram)

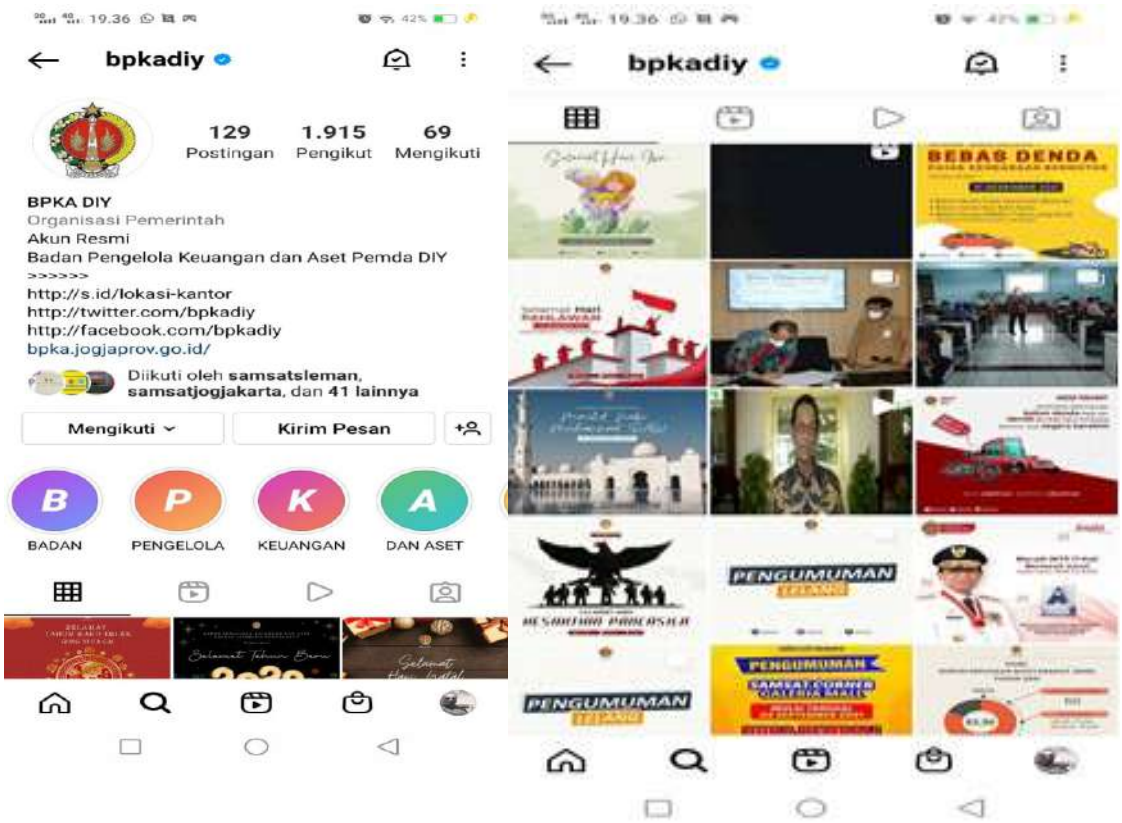

Adapun inovasi terkait dengan pelayanan pajak daerah pada KPPD DIY di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. KPPD DIY di Kota Yogyakarta

Nama Inovasi : Go-Door Pak Mau (Door To Door Pakai Motor)

Deskripsi : Layanan jemput bola penagihan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak/terlambat sesuai dengan data tunggakan hasil pendataan pada periode tertentu. Go-Door Pak Mo juga melayani jemput bola pembayaran pajak tahunan bagi wajib pajak difabel dan lansia langsung ke lokasi/rumah wajib pajak, serta melayani pembayaran pajak tahunan online se DIY. Armada Go-Door Pak Mo memakai 2 unit kendaraan roda dua milik KPPD Kota Yogyakarta yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan pelayanan di lapangan. Wajib pajak dapat menggunakan layanan ini sesuai jadwal di Kantor Kemantren dan Kalurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Foto Inovasi :

2. KPPD DIY di Kota Yogyakarta

Nama Inovasi : Go-Jak (Go Pajak)

Deskripsi : Layanan jemput bola penagihan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak yang menunggak/terlambat sesuai dengan data tunggakan hasil pendataan pada periode tertentu. Go-Pajak juga melayani pembayaran pajak tahunan online se DIY. Armada Go Pajak memakai kendaraan roda 4 jenis minibus Kijang LSX 1.8 Tahun 2000 yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan pelayanan di lapangan. Wajib pajak dapat menggunakan layanan ini sesuai jadwal di Kantor Kemantren dan Kalurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Foto Inovasi :

GO-PAJAK
SAMSAT KOTA YOGYAKART

3. KPPD DIY di Kabupaten Bantul

Nama Inovasi : Jempol Si Panda (Jemput Bola Potensi Pajak kendaraan Bermotor)

Deskripsi : Kegiatan Jempol Si Panda ini dimulai dengan konfirmasi ke Kalurahan/Padukuhan dengan membawa data potensi pajak. Kemudian pihak Kalurahan / Padukuhan memberikan informasi tagihan pajak kepada masyarakat lalu membuat janji dengan KPPD Bantul untuk melakukan pembayaran di tempat yang ditentukan (misalnya di kantor kalurahan) dengan minimal 10 wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Foto Inovasi :

4.KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo

Nama Inovasi : TAKON AKU

Deskripsi : Inovasi Takon Aku (Kontak Online Admin Samsat Kulon Progo) merupakan inovasi yang berupa WA Chatbot. Inovasi ini dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses jawaban dari beberapa FAQ yang paling sering ditanyakan oleh wajib pajak kapanpun dan dimanapun tanpa terikat jam operasional kantor. Cara penggunaanya pun cukup mudah dimana masyarakat hanya perlu menyimpan call center dari Samsat Kulon Progo (0822 4386 6668) lalu menghubungi lewat aplikasi Whatsapp dengan mengirimkan pesan Informasi Publik.

Setelah mengirimkan pesan Informasi Publik, pengguna akan mendapatkan jawaban otomatis terkait topik FAQ yang ingin diketahui. Selanjutnya pengguna hanya perlu mengetikkan nomor ataupun judul sesuai dengan topik yang ingin ditanyakan.

Foto Inovasi :

5. KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul

Nama Inovasi : *SAMSAT x McD*

Deskripsi : Samsat Gunungkidul Berkomitmen untuk Memberikan Layanan Publik secara Mudah, Cepat, dan Dekat.

"SAMSAT x McD" memiliki makna pelayanan kesamsatan yang berpedoman pada prinsip mudah, cepat, dan dekat. "SAMSAT x McD" merupakan sebuah inovasi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Samsat Gunungkidul bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu kapanewon dan kalurahan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, dan dekat. Bentuk kerja sama tersebut adalah dengan adanya 14 titik layanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan sistem penagihan PKB melalui peran serta kepala desa (Gertak Pak Kades).

Mudah, artinya wajib pajak tidak merasa terbebani ketika membayar pajak. Inovasi ini telah diimplementasikan dengan berubahnya aturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Sebelum dicetuskan inovasi, persyaratan untuk pajak tahunan meliputi STNK, kartu identitas, dan BPKB asli beseta fotokopi. Akan tetapi, berbeda halnya saat sudah ada inovasi. Sejak inovasi diimplementasikan hingga sekarang, wajib pajak cukup membawa STNK dan kartu identitas asli (tanpa fotokopi). Masyarakat juga dapat lebih mudah mengakses informasi melalui berbagai media, salah satunya media sosial. Selain itu, juga terdapat papan penunjuk arah di titik lokasi layanan untuk memudahkan wajib pajak mengetahui alur pembayaran pajak.

Cepat, artinya wajib pajak tidak perlu menunggu lama ketika membayar pajak. Dengan adanya 14 titik layanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul, maka akan meminimalisasi tumpukan antrian di Samsat induk. Semakin banyak titik layanan, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran pajak. Pembayaran pajak tahunan membutuhkan waktu maksimal 30 menit dan pembayaran pajak 5 tahunan memerlukan waktu maksimal 90 menit sebelum ada inovasi, sedangkan setelah ada inovasi hanya memerlukan waktu maksimal 10 menit untuk pembayaran pajak tahunan dan maksimal 30 menit untuk pembayaran pajak 5 tahunan.

Dekat, artinya petugas Samsat yang "mendatangi" wajib pajak. Jarak tempuh wajib pajak ke lokasi pelayanan terdekat berkisar antara 7 km – 20 km setelah dilakukan inovasi, sangat jauh berbeda saat belum dilakukan inovasi dimana jarak tempuh terdekat berkisar antara 20 km – 40

km. Masyarakat juga tidak perlu khawatir apabila terjadi tunggakan PKB, karena melalui “Gertak Pak Kades” masyarakat akan diberi himbauan tertulis mengenai informasi tunggakan PKB sehingga dapat meminimalisasi dikenakannya denda administrasi atas tunggakan PKB tersebut.

Foto Inovasi :

6. KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul

Nama Inovasi : Gertak Pak Kades (Gerakan Taat Pajak Pakai Kader Desa)

Deskripsi : Gertak Pak Kades adalah Gerakan Taat Pajak Pakai Kader Desa, yaitu inovasi untuk mengurangi tanggakan pajak dengan suatu gerakan agar masyarakat wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan melibatkan Perangkat Desa untuk terlibat dan terjun langsung sebagai ujung tombak untuk melaksanakan penagihan terhadap masyarakat wajib pajak yang masih menunggak atau belum melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melewati tanggal jatuh tempo.

Inovasi ini bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun titik berat inovasi ini adalah terjalinnya kerja sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Gunungkidul dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dalam hal ini Kecamatan dan Desa. Kegiatan ini bersifat inovatif mengingat tidak ada daerah lain yang melaksanakannya. Berhasilnya pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan tercapainya persamaan persepsi dan saling pengertian antara para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan inovasi tidak banyak melibatkan dan membutuhkan teknologi informasi kekinian, namun justru kembali ke 'pola kerja jadul' yang lebih mementingkan pertemuan musyawarah dan silaturahmi. Pola kerja lama ini harus ditempuh dengan pertimbangan mementingkan hasil atau tujuan yang ingin dicapai daripada proses pelaksanaan dengan memaksanakan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak semua pihak mampu. Pertimbangan utama pelaksanaannya adalah menyesuaikan dengan kondisi geografis wilayah Gunungkidul yang mayoritas berupa hutan dan perbukitan, serta karakteristik masyarakat Gunungkidul yang lebih senang 'diuwongke' daripada disodori teknologi informasi yang secara estimologi masih sulit diterima.

Secara singkat kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- Diawali data tunggakan yang telah disiapkan oleh KPPD dan didistribusikan kepada Perangkat Pemerintah Desa setelah diberikan bimbingan teknis atau pembekalan tentang teknis pelaksanaan pendataan di lapangan.
- Perangkat Desa dengan berbekal data tunggakan melakukan pendataan langsung kepada wajib pajak. Hasil dari konfirmasi tersebut dilaporkan kepada KPPD.
- Hasil laporan pendataan ditindaklanjuti oleh KPPD dengan membuat Surat Konfirmasi/Penagihan dan KPPD menyiapkan sarana dan prasarana untuk menerima respon dari wajib pajak yang menerima Surat Konfirmasi/Tagihan tersebut dengan memberikan

reward kepada wajib pajak yang telah datang untuk memenuhi kewajibannya sesuai Surat Konfirmasi/Tagihan yang telah diterimanya.

Foto Inovasi :

7. KPPD DIY di Kabupaten Sleman

Nama Inovasi : 1.) INFOSAKU (Informasi Masa Berlaku)

Deskripsi : INFOSAKU (Informasi Masa Berlaku) adalah layanan unggulan dari KPPD Sleman yang akan memberikan informasi berupa pengingat mengenai masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang akan segera berakhir. Manfaat dari layanan ini adalah untuk mencegah wajib pajak yang lupa dalam membayar pajak kendaraan, sehingga wajib pajak terhindar dari denda karena terlambat membayarkan pajak yang telah jatuh tempo. Admin INFOSAKU akan mengirimkan pemberitahuan masa berlaku pajak yang segera berakhir melalui pesan *Whatsapp* 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo, sehingga wajib pajak bisa leluasa dalam mempersiapkan waktu pembayaran pajak. Infosaku menggunakan data nomor *Whatsapp* yang sudah terdaftar pada aplikasi samsat dan terus berupaya untuk mendapatkan nomor *Whatsapp* wajib pajak yang belum terdaftar melalui website samsat maupun secara langsung saat wajib pajak membayar di loket layanan.

Foto Inovasi :

8. SAMSAT ON CALL (Pelayanan Perpanjangan Pajak Kendaraan Tahunan dengan Perjanjian)

Deskripsi : Layanan Samsat On Call merupakan terobosan layanan yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan waktu pembayaran yang fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan layanan Samsat on Call ini pembayaran pajak tahunan tidak perlu lagi datang ke Samsat Sleman, petugas Samsat Sleman yang akan datang ke Kantor, Pabrik, Komunitas maupun kelompok-kelompok lainnya, hanya dengan syarat memenuhi 10 kendaraan sebagai persyaratan minimal untuk menghadirkan Samsat on Call. Samsat On Call memiliki keunikan bahwa bayar pajak tahunan tidak harus datang ke Samsat, tidak harus mengikuti jadwal layanan yang sudah ditentukan oleh Samsat, tetapi wajib pajak sendiri yang membuat jadwal pelaksanaan pembayaran pajak. Adanya layanan ini dapat membantu wajib pajak dalam menghindari keterlambatan pembayaran pajak karena faktor tidak sempat datang ke Samsat, selain itu layanan Samsat On Call ini membantu mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat pada masa pandemi sehingga sangat mendukung untuk mengurangi terciptanya kerumunan massa.

Foto Inovasi :

3.4. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya guna dan berhasli guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor

pendukung Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.17 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi pertemuan, aplikasi SIPD dan pendampingan teknis	Ketepatan Penyusunan APBD dan Perubahan PAPBD	30 OPD	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Kemendagri RI	Konsultasi, Komunikasi, Informasi dan Evaluasi			
		Dunia usaha	-			
		Perguruan tinggi	Masukan, Isu dan Strategi			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Masyarakat	Masukan permasalahan			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Evaluasi Penyusunan APBD 2. Peningkatan Kapasitas TAPD
2.	Penatausahaan Keuangan Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kemendagri RI PT Taspen Bank BPD DIY	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi rekonsiliasi, Rekapitulasi, kesepakatan, aplikasi SIPD dan pendampingan teknis Konsultasi informasi dan evaluasi, persyaratan pencairan Dana Pusat ke Daerah Kesepakatan dan tindak lanjut kelebihan/kekurangan setoran JKK-JKM Berita Acara Rekonsiliasi Kas Daerah	Akuratisasi penatausahaan keuangan daerah	30 OPD	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Rekapitulasi dan Penyusunan Usulan Gaji

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		KPPN dan KPP Pratama BPJS Kesehatan	Berita Acara Rekon Pajak Pusat Kesepakatan dan tindak lanjut kelebihan/kekurangan setoran iuran BPJS			2. Peningkatan Kapasitas TAPD
3.	Pelaporan dan Pertanggungja waban APBD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kemendagri RI, Kemenkeu BPK RI Inspektorat/APIP DPRD DIY	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi rekonsiliasi, Rekapitulasi, dan pendampingan Konsultasi dan evaluasi, Penilaian/penghargaan Audit/Pemeriksaan LK Review Laporan Keuangan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Ketepatan penyampaian LKPD dan pertanggungja waban APBD	1 dokumen	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
						Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan evaluasi dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Peningkatan kinerja TAPD
4.	Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Kemendagri RI	Konsultasi dan evaluasi, informasi	Pembinaan pengelolaan keuangan yang konsisten	83 lembaga (5 Pemda Kabupaten/ Kota, 3 BUMD, 75 BUKP	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Tim Evaluasi APBD kab/Kota	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi dan bahan evaluasi/pencermatan			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Tindak lanjut hasil evaluasi 2. Peningkatan kinerja Tim Evaluasi
		Inspektorat/APIP	Pengawasan internal pemerintah			-
		BLUD	Input dasar pembinaan			-
		Bappeda DIY	Perencanaan tahunan			-
		Biro Hukum	Kebijakan peraturan perundangan, mekanisme administrasi dan legislasi BUMD			-
5	Pengelolaan Pendapatan Daerah	TAPD	Inventarisasi permasalahan, update dan dukungan data, fasilitasi inplementasi, rekonsiliasi aplikasi SIPD dan pendampingan teknis	Ketercapaian Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah	18 OPD berpendapatan	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
						Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Kepolisian	Ketercapaian pajak dari PKB dan BBNKB			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Tindak lanjut perencanaan pendapatan 2. Peningkatan kinerja petugas pelayanan kesamsatan
		PT Jasa Raharja	Ketercapaian pajak dari PKB dan BBNKB			
		Pertamina	Penetapan target, penghitungan realisasi dan ketercapaian pajak PBBKB			
		Media massa	Publikasi kebijakan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Masyarakat	Masukan/sumber pajak daerah			
		Dunia usaha/dealer otomotif	Ketercapaian PAD dari sector BBNKB			
6.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pencermatan dokumen RKA OPD	Optimalisasi Barang Milik Daerah	30 OPD	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		BPK RI	Bahan Pemeriksaan laporan keuangan			
		Dinas Perhubungan	Tim Penilai Independen obyek penindahtanganan BMD			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bahan Tindak lanjut penilaian dan penyusunan RKBMD 2. Peningkatan kinerja Tim Evaluasi
		Dinas PU ESDM	Tim Penilai Independen			
		KPKNL	Pelaksana lelang BMD			
		Bappeda	Penyelarasan perencaan pembangunan daerah			
		Inspektorat	Review dan Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan BMD			
		Biro Hukum	Legalisasi Pelaksanaan pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :
1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat 1 (satu) target sasaran BPKA DIY pada tahun 2021 yang tidak berhasil dicapai karena faktor eksternal, yaitu terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan dari hasil optimalisasi aset yang disebabkan adanya pengajuan penurunan tarif sewa oleh mitra pemanfaat terhadap barang milih daerah. Selain itu nilai *appraisal* barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan BMD tidak dapat dimaksimalkan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- ✓ Penyesuaian peraturan dan ketentuan yang ada di daerah mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat;
- ✓ *Review*/penyesuaian atas nilai *appraisal*/penilaian berdasarkan kondisi perekonomian (khususnya berdasar dampak pandemi Covid-19) maupun penilaian dalam rangka pemanfaatan aset yang belum dilaksanakan penilaian;
- ✓ Penilaian *High Best Use (HBU)* untuk melihat potensi dan peruntukan yang dapat dioptimalkan atas aset aset Pemda DIY.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Visi : Terwujudnya peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja
Misi : 1. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis*

Tupoksi : *melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, akuntansi dan pengelolaan barang daerah*

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target					Ket
					TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas pengelola keuangan daerah	Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan.	%	100	100	100	100	100	
		Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	rupiah	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818
Website : http://.bpka.jogjaprov.go.id. Email : bpka@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dengan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc.
NIP. 196802161994031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	Triwulan I	21
					Triwulan II	48
					Triwulan III	75
					Triwulan IV	100
2.	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Rp	6.704.805.116	Triwulan I	2.245.441.800
					Triwulan II	2.427.733.600
					Triwulan III	3.419.000.000
					Triwulan IV	6.704.805.116

Keterangan:
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 10.725.033.000,-
2.	Program Peningkatan Pendapatan KPPD		
3.	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp1.345.334.212.445,-
4.	Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah		
5.	Program Penatausahaan Keuangan Daerah		
6.	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
7.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.762.672.000,-
8.	Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah		
9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 154.420.179.648,-
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		

Yogyakarta, 12 Nopember 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc
NIP.196802151994031005

PENGHARGAAN TAHUN 2021

1. *WTP 11 kali berturut-turut*

Yogyakarta (26/10/2021) jogjaprov.go.id – Untuk ke-11 kalinya, secara berturut-turut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI.

Piagam penghargaan telah diterima oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (26/10) siang di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, didampingi Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan Kepala BPKA DIY Wiyos Santosa. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Arif Wibawa, MM.

2. *WBK pada KPPD DIY di Kota Yogyakarta*

panrb **PIAGAM PENGHARGAAN**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY
DI KOTA YOGYAKARTA

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 20 Desember 2021

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

3. *WBK pada KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo*

panrb **PIAGAM PENGHARGAAN**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY
DI KABUPATEN KULON PROGO

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 20 Desember 2021

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo